

Hegemoni dan Arah Diskursif Ganda: Analisis Diskursus Kereta Api Cepat Indonesia dan Perairan Natuna

Hegemony and Dual Discursive Directions: Critical Discourse Analysis of Indonesia's High-Speed Rail and Natuna Sea

Panji Ahmad*, Udi Rusadi, Asrul M. Mustaqim, Mieke Suharini, Indah C. P
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia
e-mail: asrul.mustaqim@iisip.ac.id

Article Info

Article history:
Submitted
May 5, 2026
Revised
June 7, 2026
Accepted
Juni 25, 2026

Abstract

Political elite power is exercised not only through institutional and personal actions but also through discursive practices that construct one-sided truths while delegitimizing opposing positions. This study examines government discourse surrounding two critical issues: the Jakarta–Bandung high-speed rail project and the Natuna Sea. Both cases reflect public anxieties about China's potential influence on Indonesia's independence and sovereignty. The research investigates how President Joko Widodo and Coordinating Minister Luhut Binsar Panjaitan articulate discursive strategies that either include or exclude China. The theoretical framework combines Van Leeuwen's Critical Discourse Analysis (CDA) with Antonio Gramsci's concept of hegemony, while the methodology applies Halliday's Social Semiotics (MAK) and Van Leeuwen's inclusion–exclusion categories. Data consist of purposively sampled online media texts containing direct statements from both actors. Findings reveal a dual discursive direction: in the high-speed rail issue, discourse includes China, positioning it as a powerful partner supporting Indonesia's development; in the Natuna case, discourse excludes China, framing it as a sovereignty threat. Joko Widodo legitimizes his discourse through presidential authority and populist hegemony as an active revolution, while Luhut advances technocratic rationality and negotiation hegemony as a passive revolution. These dual discursive strategies illuminate the interplay between sovereignty and pragmatism in Indonesian political communication.

Key Words: *CDA, Dual Discursive, Hegemony, High-Speed Rail, Natuna Sea*

Abstrak

Kekuasaan elit politik tidak hanya dijalankan melalui tindakan institusional dan personal, tetapi juga melalui praktik diskursif yang membentuk kebenaran sepihak sekaligus mendelegitimasi pihak lain. Penelitian ini mengkaji wacana pemerintah terkait dua isu krusial: proyek Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung dan perairan pulau Natuna. Kedua isu tersebut merefleksikan kekhawatiran publik terhadap potensi pengaruh Cina terhadap kemandirian dan kedaulatan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menelaah arah diskursus pemerintah yang diartikulasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, khususnya apakah Cina didiskusikan secara inklusif atau eksklusif. Kerangka teori yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis (CDA) Van Leeuwen dan konsep hegemoni Antonio Gramsci, dengan metode Semiotik Sosial MAK Halliday serta kategori inklusi–eksklusi Van Leeuwen. Data penelitian berupa teks pernyataan

langsung kedua aktor yang dipilih secara purposif dari media daring sesuai relevansi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya arah diskursif ganda (dual discursive direction): pada isu Kereta Api Cepat, wacana cenderung menginklusi Cina sebagai mitra pembangunan yang kuat; sedangkan pada isu Laut Natuna, wacana bergeser mengeksklusi Cina sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Joko Widodo melegitimasi wacananya melalui otoritas kepresidenan dengan hegemoni populis sebagai revolusi aktif, sementara Luhut mengembangkan rasionalitas teknokratis dengan hegemoni negosiasi sebagai revolusi pasif.

Kata Kunci: CDA, Diskursif Ganda, *Hegemony*, Kereta Api Cepat, Perairan Natuna

PENDAHULUAN

Kekuasaan elit politik merupakan fenomena sentral dalam kajian sosiologi politik dan ilmu pemerintahan. Elit politik bukan sekadar pemegang jabatan formal, melainkan kelompok kecil yang memiliki akses eksklusif terhadap sumber daya strategis dan kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan secara signifikan (Mills, 2023). Dalam konteks demokrasi kontemporer, dinamika kekuasaan elit sering kali mengalami ketegangan antara upaya mempertahankan pengaruh dan kebutuhan untuk memperoleh legitimasi dari publik. Legitimasi menjadi fondasi krusial; tanpa adanya pengakuan moral dan hukum dari rakyat, kekuasaan elit akan terjebak dalam pola otoriter yang rentan terhadap instabilitas (Beetham, 2013). Di banyak negara berkembang, konsolidasi kekuatan elit sering kali bermanifestasi melalui jaringan patronase yang kuat, yang menantang prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kekuasaan elit politik tidak hanya dijalankan melalui institusi formal, tetapi juga melalui penguasaan atas ruang diskursif. Diskursus menjadi instrumen strategis untuk memproduksi "kebenaran" versi elit yang berfungsi untuk mendefinisikan siapa yang termasuk dalam lingkaran kepentingan (*inclusion*) dan siapa yang harus dipinggirkan (*exclusion*). Melalui narasi yang terstruktur, elit mampu membangun legitimasi diri sekaligus melakukan delegitimasi terhadap lawan politik dengan cara membingkai mereka sebagai ancaman bagi stabilitas atau nilai-negara (Foucault, 1972). Bagaimana elit politik membangun narasi merupakan fenomena komunikasi, yang arahnya bisa dipengaruhi oleh karakteristik narasi yang dibangun oleh aktor elit politik sendiri. Hal sejalan dengan Fiske (1990) bahwa dalam perspektif semiotic, komunikasi merupakan proses produksi dan pertukaran makna yang bisa dipengaruhi oleh factor sosial dan budaya lingkungannya. Dalam konteks ini menurut pemikiran Foucault (1972), diskursus adalah sistem regulasi yang menentukan *apa* yang boleh dikatakan, *siapa* yang berhak mengatakannya, dan *bagaimana* sesuatu itu dianggap sebagai kebenaran.

Salah satu fenomena diskursus kekuasaan ialah tentang kekuasaan Cina di Dunia termasuk di Indonesia. Pada tahun 2013, Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan yang disebut *Belt and Road Initiative* (BRI), sebagai salah satu strategi yang dikeluarkan oleh Xi Jinping untuk memperluas kuasa pengaruh melalui penyelesaian atas kesenjangan pembangunan (infrastruktur) global. Dampaknya beragam, di Indonesia, BRI antara lain mendorong proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran soal utang dan kedaulatan (Mike, 2025).

Selain itu diskursus kekuasaan tentang Cina juga terjadi dalam isu konflik perarian Natuna. Dalam kasus ini, melalui Indonesia *Nine-dash line China*. Pemerintah Cina melakukan klaim sepihak atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, termasuk area yang masuk ZEE Indonesia di Natuna. tetapi menolak klaim Cina yang

dianggap tidak sesuai UNCLOS 1982. Dalam konteks ini Natuna Utara: kaya sumber daya minyak dan gas, serta jalur pelayaran strategis. Kedua fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan apakah ada pengaruh dari kuasa Cina terhadap kedaulatan bangsa Indonesia khususnya dalam kebijakan atau proyek pembangunan di Indonesia dan kebijakan hubungan internasional. Kebijakan yang menjadi fokus penelitian ialah tentang pembangunan kereta api cepat yang berkaitan dengan kebijakan publik dan privat (bisnis), dan kasus natuna yang berkaitan dengan kebijakan hubungan interternasional berkaitan geopolitik.

Berdasarkan penelusuran literatur, studi-studi yang berkaitan dengan relasi kuasa Cina dengan Indonesia tergolong pada tiga klaster besar: (1) persepsi dan narasi tentang Cina, (2) politik-ekonomi BRI dan rivalitas besar, dan (3) posisi politik-ekonomi-etnis Tionghoa di Indonesia. Permasalahan pengaruh kuasa Cina terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, berkaitan dengan studi dalam klaster pertama. Pada klaster ini, beberapa studi memetakan persepsi elite dan publik tentang bangkitnya Cina. Antara lain menekankan adanya ambivalensi apakah kehadiran Cina merupakan ancaman atau peluang ekonomi (Fitriani, 2018; Yeremia, 2020), *Soft power* budaya Cina antara lain melalui diplomasi Pendidikan dinilai hanya sebagian berhasil mengubah kebijakan, tetapi kurang efektif menggeser kecurigaan publik (Tuty et al., 2023).

Dari tinjauan literatur tersebut. pemerintah Indonesia disatu sisi berhadapan dengan publik yang menyuarakan ancaman Cina, disisi lain dalam konteks hubungan internasional, perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah Cina. Suara pemerintah Indonesia sering disuarakan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tujuan penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana arah diskursus yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini ialah dua elit politik presiden Joko Widodo dan Menteri Maritim dan Investasi tentang relasi kuasa Cina dengan Indonesia.

Berbeda dengan studi terdahulu yang memfokuskan pada persepsi mengenai relasi kuasa Cina dengan Indonesia, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana penguasa membangun diskursus yang bisa menegasi relasi tersebut atau sebaliknya, meneguhkan kedaulatan sebagai bangsa atau sebaliknya. Perbedaan lain dalam penelitian ini akan lebih spesifik membandingkan konstruksi yang dibangun Presiden dan Menteri Maritim dan Investasi. Penggunaan dua tokoh tersebut merefleksikan kekusaan pemerintah yaitu presiden Joko Widodo sebagai penguasa tertinggi dalam merumuskan kebijakan dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai penguasa level teknis yang bertanggungjawab di bidang kemaritiman dan investasi.

Fenomena persepsi masyarakat tentang relasi kuasa yang ambivalen, dan adanya patronase dalam proyek penanganan keamanan laut, merupakan fenomena yang terkait pada teori diskursus krikal (CDA). Untuk menjawab masalah penelitian digunakan landasan teoritis yang mengintegrasikan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) dari Van Leeuwen (2008) dengan semiotika Sosial MAK Haliday untuk menyingkap bagaimana legitimasi kekuasaan dikonstruksi melalui bahasa. Frame work untuk menganalisis hasil analisis teks digunakan teori Hegemoni Gramscian.

Analisis Diskursus Kritis (CDA) Theo van Leeuwen dalam penelitian ini tidak sekadar dipandang sebagai studi kebahasaan, melainkan sebagai upaya menyingkap bagaimana realitas sosial dikonstruksi oleh aktor yang memiliki otoritas. van Leeuwen (2008) menawarkan kerangka operasional untuk melihat bagaimana praktik sosial diubah menjadi diskursus melalui mekanisme inklusi dan eksklusi aktor. Lebih jauh, van Leeuwen menekankan pada peran Legitimasi, yakni jawaban

atas pertanyaan "mengapa kita harus melakukan hal ini?". Dalam diskursus pembangunan, elit sering menggunakan *Rationalization*, di mana tindakan divalidasi berdasarkan efektivitas, kegunaan, dan objektivitas teknis (seperti kemajuan teknologi kereta cepat). Hal ini seringkali berbarengan dengan *Authorization*, yakni legitimasi yang bersumber dari tradisi, hukum, atau posisi formal pejabat publik. Dengan CDA, akan diungkapkan bagaimana Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan membingkai kehadiran kuasa ekonomi Cina apakah sebagai ancaman atau sebagai keniscayaan rasional bagi modernitas Indonesia. Apakah praktik rasionalisasi atau otorisasi yang mengarahkan penguasaan sebagai sebuah konsensus atau hegemoni.

Teori Hegemoni Gramscian dan Konsensus Pembangunan digunakan untuk memahami mengapa narasi elit dapat diterima oleh publik tanpa resistensi yang signifikan, Gramsci, A.(1971) mendefinisikan hegemoni sebagai dominasi satu kelas atau kelompok atas yang lain melalui kepemimpinan moral dan intelektual, yang menghasilkan persetujuan (*consent*) dari kelompok yang didominasi. Dalam konteks ekonomi-politik, hegemoni bekerja dengan menjadikan agenda elit sebagai "akal sehat" (*common sense*) kolektif. Dalam konteks penelitian ini hegemoni menjelaskan bagaimana pemerintah "menormalkan", ketergantungan pada Cina dan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai "Common Sense" (akal sehat) pembangunan

Cox, Robert (1983) memperluas diskursus hegemonik ke ranah internasional, bahwa hegemoni negara tidak hanya bersifat material (militer/ekonomi), tetapi juga ideasional. Dengan landasan tersebut kemungkinan pemerintah Indonesia, melalui "Revolusi Pasif", mengadopsi elemen-elemen globalisasi ekonomi Cina ke dalam kebijakan domestik tanpa mengubah struktur kekuasaan, sehingga ketergantungan ekonomi diposisikan sebagai strategi pragmatis demi kepentingan nasional yang lebih besar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Diskursus Kritis (CDA) dengan model sosiosemantik van Leeuwen (2008). Pilihan terhadap CDA Theo van Leeuwen didasarkan pada kemampuannya dalam membedah sosiosemantik dari sebuah teks, melampaui sekadar analisis tekstual linguistik. Berbeda dengan Fairclough yang berfokus pada dialektika sosial-diskursif atau van Dijk pada kognisi sosial, van Leeuwen menyediakan kerangka "Representasi Aktor Sosial" yang sangat presisi untuk membedah kebijakan publik. Analisis eksklusi (Penghilangan), dalam isu Kereta Cepat dan perairan Natuna dengan menggunakan CDA van Leeuwen memungkinkan peneliti melacak aktor atau isu apa yang sengaja dihilangkan atau di eksklusi yang bukan karena sekadar ketidaksengajaan, melainkan sebagai strategi diskursif untuk meminimalisir resistensi. Sebaliknya dengan analisis Inklusi (Penonjolan), dapat diidentifikasi aktor-aktor yang mendukung narasi pemerintah (investor, teknologi tinggi, efisiensi). Dengan demikian melalui metode ini, penelitian tidak hanya mencari data apa yang "dikatakan" oleh Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, tetapi juga dari apa yang "sengaja tidak dikatakan". Inilah yang menjadi basis metodis untuk menemukan bias dan keberpihakan dalam diskursus kuasa Cina.

Subyek penelitian ialah kutipan langsung pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, bertujuan untuk menangkap Tindakan Tutur otentik tentang kekuasaan Cina pada isu perairan Natuna dan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Untuk mendapatkan data yang mencerminkan "permasalahan", digunakan menggunakan teknik *Theoretical Sampling* (Glasier &

Strauss, 1967), yaitu pengumpulan data secara purposive yang didorong oleh kebutuhan teori untuk mengeksplorasi konsep (seperti hegemoni dan legitimasi). *Time Frame* (Rentang Waktu) tahun 2019 -2024. Periode ini mencakup eskalasi signifikan di Natuna (Januari 2020) dan fase krusial pembangunan KCJB (pembengkakan biaya/cost overrun hingga peresmian 2023). Dengan teknik ini memungkinkan melihat konsistensi atau pergeseran diskursus. Walaupun kebijakan karena api cepat dan perairan Natuna merupakan peristiwa yang sudah berlalu, isu yang menjadi kasus bahasan ialah kuasa Cina dan relasinya dengan berbagai negara termasuk Indonesia merupakan isu yang sampai saat ini masih jadi perdebatan, sehingga signifikansi teoritisnya tentang relasi kuasa dimensi bisnis dan kedaulatan yang menjadi kuat, dan signifikansi empirisnya bisa digunakan dalam menghadapi permasalahan yang timbul terkait bagaimana komunikasi dalam menghadapi diskursus konflik kekuasaan.

Analisis menggunakan kerangka tiga dimensi register Halliday (1978) meliputi: (1) Pelibat Diskursus (*Tenor of Discourse*), dalam hal ini menganalisis kedudukan dan peran aktor (Presiden dan Menko Maritim dan Investasi) dalam konteks relasi kuasa yang terbangun antara Cina dan dengan publik, (2) Medan Diskursus (*Field of Discourse*), dengan mengidentifikasi teks ungkapan langsung dari aktor presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan yang terkait isu Kereta Api Cepat dan Perairan (3). Mengungkapkan dan menganalisis mode Diskursus (*Mode of Discourse*), dengan menggunakan kerangka analisis CDA van Leeuwen, apakah menginklusi atau mengeklusi kekuasaan Cina, dan bagaimana ungkapan retorika yang digunakan, yaitu instrumen legitimasi apa yang digunakan apakah atas dasar rasionalitas atau aotoritas (*Authorization* atau atau *Rationalization*). Hasil analisis kemudian diinterpretasi untuk menemukan arah diskursus dan praktik hegemony yang dilakukan apakah menggunakan revolusi pasif atau aktif. Untuk menunjukkan keabsahan hasil penelitian akan menggunakan kriteria kecocokan dengan situasi historis (*historical situatedness*) sebagaimana berlaku dalam penelitian yang menggunakan perspektif kritikal (Guba, Egon G and Lincoln, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis berikut mengfokuskan pada dua kategori pelibat diskursus (*tenor of discourse*) yaitu pemerintah Indonesia yaitu aktor politik Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, dan Negara Cina. Fokusnya ialah mendeskripsikan apakah elit politik Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, menginklusi atau eksklusi negeri Cina, dan dengan cara apa melegitimasi ucapannya.

Tabel 1. Pernyataan Pelibat Diskursus Presiden Joko Widodo tentang Isu Kereta Api Cepat

No	Teks Pernyataan	Sumber
1	"Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya," ujar Jokowi	Kompas.com
2	Kita berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer of technology yang kita harapkan SDM-SDM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan ini. Kita harapkan nanti apabila sudah diputuskan [kereta cepat] ini akan diperpanjang sampai ke Surabaya," tutupnya	Business.com
3	"Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan," jelas Jokowi.	Kompas.com

(Sumber : Olah Data Peneliti, 2026.)

Pada pernyataan pertama Presiden Joko Widodo mengungkapkan—*"Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya"*—. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas adanya penerapan strategi eksklusif. Dalam pernyataan ini, entitas 'Cina' secara sengaja disembunyikan dan digantikan dengan representasi aktor yang lebih umum, yakni diksi 'investor'.

Dari aspek legitimasi, Presiden membangun ketegasan sikapnya melalui penggunaan otoritas personal (direpresentasikan oleh kata ganti tunggal 'saya'). Otoritas ini diperkuat dengan legitimasi tradisi melalui frasa *"memang harus seperti itu"*, yang membingkai penolakan terhadap intervensi asing sebagai sebuah kelaziman bernegara.

Meskipun demikian, tinjauan semiotika sosial memperlihatkan adanya ambivalensi dalam ketegasan tersebut. Pelibat diskursus (*tenor of discourse*) secara spesifik hanya mengonstruksikan dikotomi antara aktor 'saya' dan 'investor'. Walaupun Presiden menggunakan repetisi (pengulangan kata) untuk menegaskan keengganannya diatur, penolakan ini secara linguistik tidak bersifat mutlak. Pemilihan frasa *"jangan juga terlalu ikut"* justru mendilusikan ketegasan sebelumnya, yang secara implisit menyiratkan makna kompromistis: bahwa intervensi atau kendali dari pihak investor pada dasarnya masih dapat ditoleransi asalkan tidak melampaui batas tertentu.

Beralih pada pernyataan kedua—*"Kita berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer of technology yang kita harapkan SDM-SDM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan ini. Kita harapkan nanti apabila sudah diputuskan (kereta cepat) ini akan diperpanjang sampai ke Surabaya"*—. Teks ini masih menggunakan strategi **eksklusi** yang masih selaras dengan pernyataan pertama. Aktor asing (Cina) kembali dihilangkan dan direpresentasikan secara abstrak. Sebaliknya, melalui strategi **inklusi**, Presiden menonjolkan narasi "transfer teknologi" dan "peningkatan kapasitas keilmuan SDM". Dalam perspektif Gramsci, narasi ini merupakan artikulasi hegemonik yang dirancang untuk merasionalisasi proyek sekaligus membangun konsensus dan kepercayaan di tengah masyarakat.

Dari segi **legitimasi**, teks ini tidak hanya bersandar pada otoritas personal, tetapi juga memadukannya dengan otoritas impersonal. Hal ini ditunjukkan melalui narasi yang seolah melegitimasi sebuah keniscayaan akan keberlanjutan kerja sama investasi. Tinjauan semiotika sosial mempertegas hal ini melalui penggunaan pronomina *"kita"*. Pemilihan diksi ini merepresentasikan gaya bahasa ekspositoris yang bertujuan meleburkan harapan individual Presiden menjadi sebuah visi dan harapan kolektif bersama. Melalui abstraksi aktor, Presiden mengarahkan publik untuk mendukung keberlanjutan investasi hingga ke Surabaya tanpa perlu memperdebatkan siapa penyandang dananya.

Pola dominasi diskursif ini berlanjut pada pernyataan ketiga: *"Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan."* Pada teks ini, Joko Widodo kembali melakukan inklusi secara masif terhadap narasi kepentingan publik. Proyek KCJB dibingkai (*framing*) semata-mata sebagai solusi teknis untuk menekan kerugian ekonomi akibat kemacetan. Praktik penonjolan utilitas publik ini secara diskursif beroperasi sebagai strategi eksklusif yang krusial, yakni untuk menyembunyikan atau menutupi realitas bahwa proyek tersebut pada dasarnya diikat oleh skema utang yang membebani negara.

Tabel 2. Pernyataan Pelibat Diskursus Luhut Binsar Panjaitan tentang isu Kereta Api Cepat

No	Teks Pernyataan	Sumber
1	"Kita melihat, mana sih negara yang paling kuat kalau kita ajak investasi enggak banyak macam-macamnya? Ya, cuma China," kata Menko Luhut	Business.com
2	"Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antar pemerintah). Skema B to B (antar badan usaha) itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini," kata Luhut	OkeZon.com
3	Luhut menyebut proyek ini sebagai "bukti kepercayaan Cina terhadap Indonesia."	Detik.com;Kompas.com

(Sumber : Olah Data Peneliti, 2026.)

Menganalisis pernyataan pertama Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait isu Kereta Cepat "*Kita melihat, mana sih negara yang paling kuat kalau kita ajak investasi enggak banyak macam-macamnya? Ya, cuma China*"—terlihat penerapan strategi **inklusi** yang sangat eksplisit terhadap aktor 'Cina'. Dalam pernyataan ini, Cina secara langsung disandingkan dengan entitas abstrak 'negara' secara umum untuk menonjolkan citra positifnya. Diskursus ini secara tegas melabeli Cina sebagai kekuatan utama (*super power*) yang paling pragmatis dan tidak birokratis (direpresentasikan lewat frasa "*tidak banyak macam-macamnya*") dalam urusan investasi.

Dari aspek **legitimasi**, Menteri Luhut memadukan **otoritas personal** dan **otoritas ahli** (*expert authority*) untuk meyakinkan publik. Melalui strategi rasionalisasi, ia membangun argumentasi logis bahwa pemilihan Cina merupakan keputusan investasi yang paling efisien. Sementara itu, tinjauan **semiotika sosial** memperlihatkan bahwa pelibat diskursus (*tenor of discourse*) berpusat pada 'Cina' yang dicitrakan sangat kooperatif. Penggunaan majas perbandingan (*simile*) yang membenturkan Cina dengan negara lain berfungsi untuk mengonstruksikan sebuah realitas tunggal: bahwa Cina adalah satu-satunya mitra strategis yang paling rasional dan minim hambatan.

Pola rasionalisasi teknokratis ini semakin menguat pada diskursus kedua: "*Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antar pemerintah). Skema B to B (antar badan usaha) itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini.*" Melalui pernyataan tersebut, Menteri Luhut berupaya menepis kekhawatiran publik bahwa proyek ini akan menjadi beban fiskal negara di masa depan. Secara diskursif, ia menggunakan perbandingan skema *Government-to-Government* (G2G) dan *Business-to-Business* (B2B) sebagai instrumen **legitimasi moral**, di mana skema B2B dikonstruksikan memiliki nilai (*value*) yang lebih aman dan menguntungkan.

Dari kacamata **semiotika sosial**, pronomina "*Kita*" kembali difungsikan untuk meleburkan keputusan pemerintah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Lebih lanjut, diskursus ini memanfaatkan perbandingan (*simile*) antara skema B2B dan G2G yang dipadukan secara cerdas dengan majas eufemisme (penghalusan bahasa). Eufemisme tersebut beroperasi melalui frasa "*mengurangi risiko jebakan*", yang secara diskursif bertujuan mengaburkan realitas ancaman jebakan utang (*debt trap*) dan menyutkannya sekadar menjadi risiko bisnis korporasi biasa.

Tabel 3. Pernyataan Pelibat Diskursus Presiden Joko Widodo pada isu Natuna

No	Teks Pernyataan	Sumber
1	Jokowi menegaskan "Natuna adalah Indonesia."	Tempo
2	"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.	OkeZon.com
3	"Sudah jelas, kalau masuk ke teritorial China itu kedaulatan. Tapi ZEE, semua kapal diperbolehkan (melintas), tapi jangan ambil sumber daya alam laut kita," kata Jokowi,	CNBC

(Sumber : Olah Data Peneliti, 2026.)

Beralih pada dinamika konflik kedaulatan di Laut Natuna, analisis terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo memperlihatkan ketegasan artikulasi politik. Pada teks pertama dan kedua—*"Natuna adalah Indonesia"* dan *"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita"*—Presiden menerapkan strategi **inklusi** secara kuat untuk menonjolkan status absolut Natuna sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Ketegasan ini secara taktis diiringi oleh strategi **eksklusi**, yaitu entitas asing yang menjadi aktor pelanggar kedaulatan (Cina) justru sengaja dihilangkan dari teks. Dari aspek **legitimasi**, Presiden menggunakan **otoritas personal** yang dipadukan dengan strategi **mythopoesis** (narasi peringatan) melalui frasa *"tidak ada yang namanya tawar-menawar"*. Tinjauan **semiotika sosial** mempertegas hal ini melalui pemakaian pelibat diskursus (*tenor of discourse*) *"kita"*. Pronomina ini difungsikan untuk mengonstruksikan bahwa sikap tersebut adalah sikap dan solidaritas kolektif bersama. Melalui gaya penjelasan deskriptif, argumen kedaulatan ini dibingkai agar mudah diterima publik, meskipun Presiden tetap mengeksklusi kepada siapa peringatan tersebut secara langsung ditujukan.

Pergeseran strategi diskursif terlihat pada pernyataan selanjutnya: *"Sudah jelas, kalau masuk ke teritorial China itu kedaulatan. Tapi ZEE, semua kapal diperbolehkan (melintas), tapi jangan ambil sumber daya alam laut kita."* Pada teks ini, Presiden mulai menampilkan kata 'China', namun tidak merujuknya sebagai aktor subjek, melainkan sebatas rujukan teritorial. Pada tataran **legitimasi**, Joko Widodo secara cerdas memadukan **otoritas personal** dan **otoritas impersonal** dengan melegitimasi prinsip perundang-undangan hukum laut. Melalui strategi **rasionalisasi**, ia memberikan penjelasan teknis mengenai perbedaan hak teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Rasionalisasi ini kemudian diperkuat kembali oleh strategi **mythopoesis** melalui ketegasan frasa *"jangan ambil"*. Dari kacamata **semiotika sosial**, penggunaan pelibat diskursus *"kita"* dan gaya bahasa eksposisi yang memaparkan aturan secara luas menunjukkan bahwa peringatan ini tidak ditujukan secara konfrontatif kepada 'China'. Sebaliknya, narasi ini disampaikan secara umum untuk merawat sentimen nasionalisme domestik sembari menjaga stabilitas diplomatik.

Tabel 4. Pernyataan Pelibat Diskursus Luhut Binsar Panjaitan pada isu Natuna

No	Teks Pernyataan	Sumber
1	"Jangan bilang saya itu jual atau saya lacurkan kedaulatan kita dengan investasi saya bukan orang bego," ucapnya	Kompas.com
2	"Ya makanya saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga harus lihat kita ini harus membenahi diri kita. Ya kalau kita ambil ikan sama sama kan boleh," tambahnya.	CNBC
3	Luhut kembali menegaskan posisi Indonesia di forum internasional, menyebut "Natuna tidak bisa dinegosiasikan."	Kompas.com2024

(Sumber : Olah Data Peneliti, 2026.)

Sebaliknya, analisis terhadap diskursus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Tabel 4) pada isu kedaulatan Natuna menunjukkan pola komunikasi yang bergeser menjadi sangat defensif. Pada teks pertama—*"Jangan bilang saya itu jual atau saya lacurkan kedaulatan kita dengan investasi saya bukan orang bego"*—Menteri Luhut secara mutlak menerapkan strategi **eksklusi** dengan menghilangkan aktor objek (Cina). Aktor asing ini sengaja direduksi sehingga tidak dapat dipetakan, bahkan secara abstrak sekalipun. Dari kacamata **legitimasi**, diskursus ini bertumpu pada **otoritas personal** melalui pronomina *"saya"* yang dikombinasikan dengan analogi moral negatif (*moral analogy*) dan **mythopoesis** (narasi peringatan) untuk meyakinkan publik bahwa ia tidak menggadaikan kedaulatan negara. Secara **semiotika sosial**, pemusatan pelibat diskursus pada aktor tunggal *"saya"* diperkuat secara ekspresif dengan **majas disfemisme**, yakni penggunaan diksi ekstrem yang cenderung kurang pantas (*"lacurkan"* dan *"bego"*). Pemilihan kosa kata ini secara strategis difungsikan sebagai mekanisme pertahanan diri yang keras sekaligus pembuktian sikap agar rasionalisasinya dapat diterima oleh masyarakat.

Pada teks kedua—*"Ya makanya saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga musti lihat kita ini harus membenahi diri kita. Ya kalau kita ambil ikan sama sama kan boleh"*—pendekatan **eksklusi** kembali beroperasi secara penuh (determinasi). Berbeda dengan diskursus Presiden Jokowi yang pada akhirnya memunculkan aktor 'China', Menteri Luhut konsisten menyembunyikan identitas aktor tersebut. Strategi **legitimasi** pada pernyataan ini dirancang lebih kompleks; ia memadukan **otoritas personal** dengan **moral evaluation** pada dimensi abstrak, yakni mengangkat nilai normatif kebersamaan melalui frasa *"ambil ikan sama-sama"*. Hal ini berkelindan dengan strategi **rasionalisasi** yang menghimbau publik untuk tidak memperkeruh suasana, melainkan mengalihkan fokus pada evaluasi internal bangsa. Dari aspek **semiotika sosial**, pergeseran pelibat diskursus dari *"saya"* (penegasan untuk tidak meributkan konflik) menjadi *"kita"* (ajakan berbenah dan mengelola sumber daya) merepresentasikan penggunaan kalimat **persuasif**. Pendekatan kompromistis ini dirancang untuk meredam eskalasi konflik secara halus. Sebagai penutup, pernyataan ketiga yang menegaskan bahwa *"status Natuna tidak bisa dinegosiasikan"* merupakan bentuk **inklusi** penegasan sikap terhadap posisi Luhut Binsar Panjaitan. Inklusi ini berfungsi untuk menyeimbangkan narasi pragmatismenya agar tetap terlihat sejalan dengan ketegasan teritorial pemerintah pusat

Pembahasan

Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan relasi kuasa Cina dengan Indonesia, dengan pelibat diskursus utama Pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo dan Menteri Maritim dan Investasi pada pemerintahan tahun 2019 sampai 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua elit politik tersebut mempunyai fokus berbeda pada dua isu yang diteliti yaitu isu pembangunan kereta api cepat dan isu perairan Natuna berupa konflik wilayah perairan Cina dan Indonesia.

Pada isu Kereta api cepat, Presiden Joko Widodo memberikan penekanan (inklusi) tentang kemandirian proyek Kereta Api Cepat dan proyek tersebut sebagai proses transfer pengetahuan dan teknologi. Namun demikian dalam pernyataan tersebut tidak menyebut secara ekspisit Cina sebagai objek pelaku. Artinya Cina sebagai pihak yang memiliki modal dan pemilik teknologi kereta api cepat tidak ditonjolkan. Dalam ungkapanannya Joko Widodo melegitimasi tindakannya dilakukan dengan otoritas personal sebagai Presiden RI. Menteri Luhut Binsar Panjaitan,

menginklusi Cina sebagai Negara yang kuat yang bisa memberikan investasi untuk membangun Kereta api cepat. Menteri Luhut kemudian menginklusi bahwa model pembiayaan proyek dilakukan dengan model B to B (*Business to Business*). Pernyataan ini dilakukan sebagai penjelasan terhadap kekhawatiran publik akan menjadi beban negara, sekaligus untuk mengeksklusi atau menutupi bahwa sebenarnya pada pola itu ada hutang.

Dalam isu Natuna, Joko Widodo menyebut Cina dalam konteks teritorial secara tegas, atinya Joko Widodo menginklusi untuk meneguhkan Natuna wilayah Idronesia, dan tidak bisa bisa ditawar. Legitimasi dilakukan dengan menggunakan otoritas sebagai presiden dan juga memposisikan persoalan yang dihadapi menjadi persoalan “kita”. Jokowi memposisikan masalah Natuna merupakan masalah bersama yaitu Presiden dan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan, dalam isu ini menginklusi tentang sikap dirinya “saya” tidak melihat persoalan investasi, tetapi soal kedaulatan. Namun tidak menyebutkan (eksklusi) Cina sebagai pihak yang menjadi permasalahan. Dalam upaya melegitimasi ucapannya ia menggunakan otoritas teknis, dan menggunakan kata “kita” untuk menunjukkan harapan semua masyarakat dan bangsa harus berbenah menghadapi konflik yang terjadi.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bagaimana kedua elit tersebut memposisikan Cina secara berbeda. Dalam isu tentang kereta api cepat presiden Joko Widodo, memposisikan Cina (walau tidak implisit menyebut negara), sebagai mitra yang mambantu atau menolong bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan menekankan kekuatan Cina sebagai negara kuat, dan memposisikan proyek tersebut tidak akan merugikan negara. Dengan demikian kedua elit menginklusi bahwa Cina merupakan negara penolong bangsa Indonesia yang kuat. Ini selaras dengan kajian yang menunjukkan pemerintah menggunakan proyek kereta api cepat sebagai instrumen “New Developmentalism”. Dengan instrument ini faktor pertumbuhan dan modernisasi infrastruktur menjadi sasaran, sambil menegaskan narasi “mutual benefits” dan menepis isu “debt trap” melalui diskursus keuntungan teknologi, lapangan kerja, dan kemajuan nasional (Prasetyo, 2024; Tritto, 2021; Ramadhony, 2023; Pratista et al., 2025).

Dengan demikian elit politik Indonesia memainkan *dual discursive direction* yang memperlihatkan fleksibilitas pemerintah dalam mengelola legitimasi. Diskursus pemerintah Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif terhadap konteks isu dan audiens. Strategi ini menegaskan bahwa kekuasaan elit politik dijalankan melalui kemampuan memainkan ruang diskursif, menjaga keseimbangan antara pragmatisme pembangunan dan ketegasan kedaulatan.

Dari perspektif hegemoni neo-Gramscian/Laclau–Mouffe, pemerintah yang direpresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan melakukan praktek hegemoni mengadapi individu atau kelompok yang melakukan kritik sebagai kelompok yang melakukan *counter hegemonic*. Artikulasi hegemonic dalam menghadapi kekuasaan Cina, diilustrasikan dalam formula $\text{China} + \text{infrastruktur} + \text{pertumbuhan} = \text{“kemajuan bangsa”}$, merupakan formula yang menormalkan ketergantungan pembiayaan/teknologi sebagai hal wajar dan rasional bahwa Cina menjadi penentu kemajuan bangsa mitranya. Inklusi yang dilakukan ini merupakan inklusi selektif. Dalam konteks ini Cina diinklusi dalam “blok historis” pembangunan bersama elit politik dan bisnis sedangkan resistensi komunitas lokal dan LSM diposisikan sebagai diskursus tandingan (*counter-hegemonic*) yang coba diserap dan disubordinasi (Prasetyo, 2024; Gonzalez-Vicente, 2019). Dalam kaitan ini Tritto dan Prasetyo sama-sama

menekankan bahwa narasi elitis *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah paradigma pembangunan elitis yang mengutamakan konektivitas dan akumulasi kapital, sambil mengabaikan dimensi sosial–lingkungan dan meminggirkan suara lokal (Prasetyo, 2024; Tritto, 2021; Gonzalez-Vicente, 2019). Hasil kajian ini menguatkan temuan bahwa Jokowi–Luhut memproduksi “Cina penolong” untuk menstabilkan koalisi pembangunan

Dalam isu Natuna, Joko Widodo secara keseluruhan mengeklusi Cina yang akan mengganggu teritorial negara Indonesia dan secara tegas menekankan bahwa Natuna itu Indonesia. Penegasan “Natuna itu Indonesia” memosisikan klaim Cina sebagai ancaman langsung atas kedaulatan. Penelitian tentang Natuna menunjukkan Cina digambarkan media dan negara sebagai ancaman keamanan paling mendesak melalui proses “sekuritisasi cepat” 2014–2016 (Meyer et al., 2019). Sengketa ini diposisikan sebagai konflik kedaulatan atas ZEE Indonesia, sementara klaim sembilan garis putus Cina dinyatakan tak memiliki dasar hukum internasional (Darmayadi & Purnamasari, 2022; Chasanah et al., 2023; Andriliani & Triadi, 2025; Azzahra, 2025).

Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, yang menepis kecurigaan publik ada persoalan investasi yang bisa melemahkan kedaulatan bangsa Indonesia, merupakan upaya Luhut meredam kecurigaan domestik bahwa investasi Cina melemahkan kedaulatan. Ini konsisten dengan kajian yang melihat pemerintah memainkan strategi *hedging/soft balancing* yaitu menegaskan kedaulatan dan menggugat klaim Cina di ranah hukum dan diplomasi (Darmayadi & Purnamasari, 2022; Andriliani & Triadi, 2025; Azzahra, 2025).

Temuan menunjukkan Joko Widodo membangun diskursus untuk konsumsi internasional, dalam penegakan kedaulatan pulau Natuna, sedangkan Luhut Binsar Panjaitan melihat Isu Natuna sebagai masalah domestik, yaitu ada kecurigaan pengorbanan kedaulatan untuk kepentingan investasi. Ini merupakan garis batas hegemonik (*frontier*) dimana Cina dieksklusi dari komunitas “kami” (Indonesia berdaulat) dan ditempatkan sebagai “mereka” yang mengganggu tatanan hukum dan teritorial. Namun tetap menjaga kerja sama ekonomi dan BRI, menghindari jebakan ketergantungan yang bisa membatasi otonomi politik (Pratista et al., 2025; Antika et al., 2025). Di sini, hegemoni bekerja melalui dua register, yaitu pertama, Secara eksternal/internasional, Joko Widodo mengeksklusi Cina sebagai ancaman untuk mengukuhkan identitas negara berdaulat dan meneguhkan legitimasi di mata publik regional–global (Darmayadi & Purnamasari, 2022; Meyer et al., 2019; Andriliani & Triadi, 2025; Azzahra, 2025). Kedua, dalam lingkup domestik/ekonomi politik, Luhut Binsar Panjaitan menjinakkan narasi kecurigaan investasi, demi mempertahankan konsensus pembangunan berbasis BRI dan mencegah runtuhnya blok hegemonik pro-Cina (Prasetyo, 2024; Tritto, 2021; Pratista et al., 2025; Antika et al., 2025).

Legitimasi yang dibangun dalam isu kereta api cepat, Joko Widodo dengan menunjukkan Otoritas sebagai penguasa (Presiden), dan Luhut Binsar Panjaitan dengan rasionalitas tentang sumberdaya Cina. Dalam isu Natuna, Joko Widodo menggunakan otoritas kekuasaan sebagai presiden dan Luhut Binsar Panjaitan dengan rasionias teknik. Keduanya juga mencoba berusaha mempengaruhi masyarakat agar menerimanya dengan memosisikan proyek tersebut bukan tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat Indonesia, yang mengarahkan pengakuan publik atas proyek kereta api cepat tersebut. Legitimasi dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung dan isu Natuna menunjukkan pola yang konsisten dalam strategi komunikasi pemerintah Indonesia. Joko Widodo membangun legitimasi melalui otoritas politik sebagai presiden, menekankan peran

kepemimpinan nasional dalam mendorong modernisasi dan menjaga kedaulatan. Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan menggunakan rasionalitas teknis dan ekonomi, dengan narasi yang menekankan efisiensi, kerja sama dengan Cina, serta aspek hukum internasional dalam kasus Natuna. Artinya keduanya tidak hanya menampilkan legitimasi berbasis otoritas dan rasionalitas, tetapi juga berusaha membingkai proyek sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat Indonesia. Dengan demikian, legitimasi diarahkan pada penerimaan publik, meskipun terdapat resistensi terkait isu utang, transparansi, dan kedaulatan. Temuan ini sejalan dengan kerangka CDA van Leeuwen (2008) tentang strategi legitimasi (*authorization, rationalization, moral evaluation, mythopoesis*) serta konsep hegemonik vs kompromi elit dari Gramsci (1971). Jokowi cenderung menggunakan *authorization* (otoritas presiden), sedangkan Luhut menekankan *rationalization* (teknis-ekonomi).

Dari perspektif teori hegemoni, Joko Widodo dalam menghadapi isu kuasa Cina tampak membangun hegemoninya bersifat populis, yaitu mencoba membangun *common sense* publik bahwa pembangunan kereta api cepat merupakan upaya untuk membangun keunggulan bangsa dan mengatasi permasalahan. Dalam kasus kasus Natuna berusaha menegaskan kedaulatan bangsa dan merupakan harga mati. Sedangkan Luhut hegemoninya bersifat elit-negosiasi, lebih dekat dengan konsep *passive revolution* Gramsci, di mana kompromi dilakukan melalui mekanisme teknis dan hukum. Analisis menunjukkan bahwa konsep *revolusi pasif* Gramsci dapat dioperasionalisasi untuk memahami praktik elit teknokratik (Luhut), sementara *revolusi aktif* menjelaskan mobilisasi simbolik publik (Jokowi).

Keabsahan temuan tersebut dievaluasi dengan menunjukkan apakah memenuhi kriteria *Goodness of Quality Research* dalam perspektif penelitian kritis. Temuan mengenai praktik diskursus ganda (*dual discourse*) yang diproduksi oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan ini pada dasarnya merefleksikan realitas historis tren universal komunikasi politik negara kekuatan menengah (*middle power*) di era multipolar. Dinamika struktural ini sejalan dengan pandangan Kuik (2021), yang mengemukakan bahwa dalam pusaran rivalitas geopolitik, elite politik tidak lagi mengandalkan narasi tunggal. Mereka secara taktis mengadopsi strategi penyiasatan diskursif (*discursive hedging*) guna menciptakan garis pemisah yang tegas antara kepentingan integrasi ekonomi di satu sisi, dan upaya mitigasi risiko kedaulatan di sisi lain.

Lebih lanjut, pola diskursif yang bercabang ini mengonfirmasi tesis Jones dan Hameiri (2021) mengenai peran krusial agensi elite lokal dalam memediasi penetrasi geo-ekonomi Cina. Dalam lanskap pemerintahan Indonesia, dualisme narasi tersebut telah bermanifestasi menjadi sebetulnya pragmatisme komunikasi yang terlembaga (Laksmana, 2023). Pada titik inilah praktik hegemoni beroperasi layaknya sebuah kompensasi diskursif: retorika asertif dan nasionalistis di perairan Natuna pada hakikatnya diproduksi untuk membayar 'biaya politik domestik'. Mobilisasi sentimen kedaulatan ini secara sengaja dirancang untuk meredakan kritik dan menyeimbangkan desekritisasi sistematis pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), demi mengamankan keberlanjutan arus modal asing.

SIMPULAN

Diskursus kuasa elit politik tentang Kuasa Cina di Indonesia dalam isu pembangunan kereta api cepat dan isu perairan Natuna, secara keseluruhan, mengarah pada medan diskursus yang berbeda, yaitu isu kemandirian dan kedaulatan. Dalam kasus Kereta Api Cepat, moda diskursus menginklusi kekuasaan

Cina, dengan memposisikan Cina sebagai penolong yang kuat dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia, di bidang transportasi. Sedangkan dalam kasus perarian Natuna, bergeser menjadi mengeksekusi negara Cina sebagai ancaman dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia. Dengan demikian elit politik Indonesia memainkan *dual discursive direction* yang memperlihatkan fleksibilitas pemerintah dalam mengelola legitimasi.

Kedua Elit politik, yaitu Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, dalam melegitimasi pernyataannya berkaitan secara fungsional, yaitu Joko Widodo menggunakan legitimasi otoritas kekuasaan sebagai presiden, sedangkan Luhut Binsar Panjaitan dengan rasional teknik. Temuan sejalan kerangka teoritis pada CDA van Leeuwen tentang strategi legitimasi, antara lain melalui otoritas dan rasionalitas. Dari perspektif teori hegemoni, tampak Joko Widodo, menggunakan hegemoni populis baik tentang pembangunan kereta api cepat maupun perairan Natuna, yaitu dengan membangun *common sense* publik sebagai upaya membangun keunggulan bangsa, dan kedaulatan atas natuna. Sedangkan bagi Luhut Binsar Panjaitan, persoalan pembangunan kereta api cepat, sebagai persoalan teknis yaitu efisiensi dan model pembiayaan dan isu perairan Natuna adalah persoalan hukum. Artinya hegemoni Luhut lebih mengarah pada hegemoni negosiasi elit, sebagai revolusi pasif. Sebaliknya pernyataan Joko Widodo, menggunakan revolusi aktif dengan melakukan mobilisasi simbolik kepentingan publik. Walau berbeda dalam strategi hegemoni, keduanya memengaruhi masyarakat dengan menginklusikan bahwa proyek kereta api cepat dan isu perairan Natuna sebagai masalah bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia menunjukkan pola yang konsisten dalam strategi komunikasi pemerintah Indonesia.

Implikasi teoretis temuan tersebut memperkaya kajian *Critical Discourse Analysis (CDA)* dengan menunjukkan bagaimana mekanisme inklusi dan eksklusi aktor tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap konteks isu. Konsep *dual discursive direction* yang ditemukan memperluas kerangka van Leeuwen dengan menekankan bahwa strategi legitimasi dapat bergeser dari *authorization* berbasis otoritas formal ke *rationalization* berbasis teknokrasi, tergantung pada kebutuhan politik. Integrasi dengan teori hegemoni Gramsci memperlihatkan bahwa diskursus pembangunan dapat dipahami sebagai *active revolution*, sementara wacana kedaulatan lebih dekat dengan *passive revolution*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi pada pengembangan teori CDA yang lebih sensitif terhadap dinamika politik Asia Tenggara.

Secara praktis, temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan aktor politik tentang pentingnya konsistensi narasi dalam menjaga legitimasi publik. Inklusi Cina dalam proyek pembangunan dapat memperkuat citra pemerintah sebagai pragmatis dan modernis, tetapi eksklusi Cina dalam isu kedaulatan diperlukan untuk menjaga solidaritas nasional. Strategi ganda ini, meskipun efektif, berisiko menimbulkan ambivalensi publik jika tidak dikelola dengan komunikasi yang transparan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan narasi pembangunan dengan narasi kedaulatan agar tidak menimbulkan persepsi kontradiktif.

Dalam aspek kebijakan, penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dikelola secara simultan melalui strategi komunikasi yang adaptif. Hal ini relevan bagi perumusan kebijakan komunikasi dalam upaya menjaga keseimbangan antara pragmatisme pembangunan dan ketegasan kedaulatan.

REFERENSI

- Andriliani, S., & Triadi, I. (2025). Konflik kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dalam perspektif hukum dan pendekatan kemiliteran di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.431>
- Antika, M., Darmawan, W., & Sumadinata, W. (2025). China's motivation for implementing the *Belt and Road Initiative (BRI)* in Indonesia within the context of Southeast Asia (2015–2024). *International Journal of Science and Society*. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v7i1.1362>
- Azzahra, S. (2025). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Natuna. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.220>
- Beetham, D. (2013). *The legitimation of power* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Chasanah, A., Arifin, R., & Nte, N. (2023). Indonesia–China international dispute on the Natuna Island case: Various international law discourses and practices in regional countries. *International Law Discourse in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v2i1.58390>
- Cox, R. W. (1983). Gramsci, hegemony, and international relations: An essay in method. *Millennium: Journal of International Studies*, 12(2), 162–175.
- Darmayadi, A., & Purnamasari, E. (2022). The Indonesia–China relations in the Natuna Sea dispute resolution: Struggle for sovereignty. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.870>
- Fiske, J. (1990). *Introduction To Communication Studies, Second edition* (second). Methuen & Co/Ltd.
- Fitriani, E. (2018). Indonesian perceptions of the rise of China: Dare you, dare you not. *The Pacific Review*, 31(3), 391–405. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1428677>
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge and the discourse on language* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Pantheon Books.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Gonzalez-Vicente, R. (2019). Make development great again? Accumulation regimes, spaces of sovereign exception and the elite development paradigm of China's *Belt and Road Initiative*. *Business and Politics*, 21(4), 487–513. <https://doi.org/10.1017/bap.2019.20>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Guba, Egon G and Lincoln, Y. S. (2005). Contradiction, and Emerging Confluences. In Y. s Denzin, Norman and Lincoln (Ed.), *The Handbook of Qualitative Research* (3rd editio). Sage Publication.
- Halliday, M. A. K. (1978). *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. Edward Arnold.
- Jones, L., & Hameiri, S. (2021). *Fractured China: How State Transformation Shapes China's Rise*. Cambridge University Press.
- Kuik, C.-C. (2021). "The Twin Channels of China's Economic Statecraft: Deepening Integration, Mitigating Risks, and Hedging in Southeast Asia". *Pacific Affairs*, 94(3), 477-512.
- Laksmana, E. A. (2023). "Whither Indonesia's Foreign Policy under Jokowi? Pragmatism, Indo-Pacific, and the Global Maritime Fulcrum". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 35-58.
- Lukes, S. (2021). *Power: A radical view* (3rd ed.). Bloomsbury Academic.
-

-
- Meyer, P., Nurmandi, A., & Agustiyara, A. (2019). Indonesia's swift securitization of the Natuna Islands: How Jakarta countered China's claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*, 27(1), 70–87.
<https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1590724>
- Mills, C. W. (2023). *The power elite* (New ed.). Oxford University Press. (Original work published 1956).
- Negara, Siwage Dharma (2024). Revisiting the *Belt and Road Initiative* in Indonesia: Progress, challenges, and prospects. *Journal of Southeast Asian Economies*, 41(1), pp 28-46. <http://doi.org/10.1355/ae41-1c>
- Prasetyo, K. (2024). Global South responses to China's BRI projects: A case study of Jakarta–Bandung high-speed railway project. *Global South Review*.
<https://doi.org/10.22146/globalsouth.90951>
- Tritto, A. (2020). Contentious embeddedness: Chinese state capital and the *Belt and Road Initiative* in Indonesia. *Modern International Studies*, 5(1), 182–187.
<https://doi.org/10.22459/mic.05.01.2020.24>
- Tritto, A. (2021). China's *Belt and Road Initiative*: From perceptions to realities in Indonesia's coal power sector. *Energy Strategy Reviews*.
<https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100624>
- Tuty, R., Mutia, N., Archellie, R., & Geraghty, L. (2023). Reassessing China's soft power in Indonesia: A critical overview on China's cultural soft power. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2178585>
- Van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Yeremia, A. (2020). Indonesian diplomats' and foreign policy scholars' perceptions and their implications on Indonesian foreign ministry bureaucratic responses to a rising China. *The Pacific Review*, 35(4), 529–556.
<https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1851293>
- Yuliantoro, N. R. (2023). Unravelling the *Belt and Road* puzzle in Indonesia. *The Jakarta Post*.
-